

**DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN
SYARIAH INDONESIA TAHUN 2007-2011**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

VIRDA RAKHMA SEPTIPUTRI
NIM. C2C009186

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Virda Rakhma Septiputri
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009186
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA TAHUN 2007-2011**
Dosen Pembimbing : Siti Mutmainah, SE., MS.i., Akt.

Semarang, 7 Maret 2013

Dosen Pembimbing,

Siti Mutmainah, SE., MS.i., Akt.

NIP. 19730803 200012 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Virda Rakhma Septiputri
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009186
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **DAMPAK *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN SYARIAH
INDONESIA TAHUN 2007-2011**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Maret 2013.

Tim Penguji:

1. Siti Mutmainah, SE., M.Si., Akt (.....)
2. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt (.....)
3. Faisal, SE., M.Si., Akt., Ph.D (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Virda Rakhma Septiputri, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Dampak *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik secara disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan atau menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Maret 2013
Yang membuat pernyataan,

Virda Rakhma Septiputri
NIM: C2C009186

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of corporate governance mechanisms: size of the board of directors, board of commissioners size, proportion of independent commissioners, size of the Sharia Supervisory Board, and the reputation of the Public Accounting Firm on profitability as measured by Return on Equity (ROE).

This study is an empirical research with the pooling technique in data collection. Data obtained from the financial statements and the annual report Sharia Commercial Bank the period of 2007 to 2011 with total 30 data. Multiple regression analysis was conducted by using SPSS version 16 for Windows.

The test results showed that size of the board of directors has positive and significant effect to profitability.

Keywords: corporate governance, profitability, Islamic Banks.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak mekanisme *corporate governance*: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE).

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik *pooling* dalam pengumpulan data. Data diperoleh dari data laporan keuangan dan *annual report* Bank Umum Syariah selama tahun 2007 hingga tahun 2011 dengan jumlah sebanyak 30 data. Analisis dilakukan dengan regresi berganda menggunakan program SPSS versi 16 untuk *windows*.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci : *corporate governance*, profitabilitas, Bank Umum Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas segala rahmatNya, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul: “Dampak *Corporate Governance* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011” sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan serta dorongan semangat dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, MS.i., Ph.D., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, MS.i., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Hj. Siti Mutmainah, SE., MS.i., Akt selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasehat, dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsinya hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Hj. Andri Prastiwi, SE., MS.i., Akt selaku Dosen Wali.
5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar yang pernah memberikan ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat kepada penulis.

6. Ibunda (Asih Budi Utami) dan almarhum Bapak (Achmadi) tercinta sebagai orang tua dan guru dalam menjalani hidup ini, terima kasih atas segala dukungannya baik secara materil maupun moril dan kasih sayang yang tidak terbatas kepada penulis.
7. Kakakku Widyanto Adinugroho dan Wahyu Agus Prasetyo yang selalu memberikan nasehat dan menjadi motivator penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. *My moodbooster*, Hashemi Rodhian Hanum, terima kasih telah membantuku, menemaniku, untuk semua dukungan dan perhatian yang diberikan.
9. Teman-teman baikku semasa kuliah (Richa, Nita, Ajeng, Hanni, Bella, Fenny) yang selalu mau berbagi cerita dengan penulis, memberikan bantuan, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas persahabatan kalian selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Regulear B angkatan 2009 yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta memberikan kenangan indah selama masa kuliah.
11. Teman-teman baikku, Nina, Irma, Dik Mita dan Dik Tyo, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menemani dan berbagi tawa dengan penulis.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 7 Maret 2013

Penulis

Virda Rakhma Septiputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Sistematika Penelitian	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	14
2.1.2 Bank Umum Syariah	15
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	18
2.1.4 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	19

2.1.5 Profitabilitas	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	30
2.4 Perumusan Hipotesis	31
2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Profitabilitas	31
2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas	32
2.4.3 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Profitabilitas	33
2.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas.....	34
2.4.5 Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Profitabilitas	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	37
3.1.1 Ukuran Dewan Direksi	37
3.1.2 Ukuran Dewan Komisaris	37
3.1.3 Proporsi Komisaris Independen	38
3.1.4 Ukuran Dewan Pengawas Syariah	38
3.1.5 Reputasi Kantor Akuntan Publik	38
3.1.6 Profitabilitas	39
3.1.7 Ukuran Bank	40
3.2 Populasi dan Sampel	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5 Metode Analisis	42
3.5.1 Analisis Deskriptif	42
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	46
3.5.4 Pengujian Hipotesis	47
3.5.4.1 Uji Statistik F	47
3.5.4.2 Uji t (Parsial)	47
3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	47
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	49
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	49
4.2 Statistik Deskriptif	50
4.3 Uji Asumsi Klasik	55
4.3.1 Uji Normalitas	56
4.3.2 Uji Multikolinieritas	60
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	61
4.3.4 Uji Autokorelasi	63
4.4 Hasil pengujian Hipotesis	64
4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	64
4.4.2 Uji t	65
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	69
4.5 Pembahasan Hasil Pengujian Statistik	70
4.5.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Profitabilitas ...	70

4.5.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas	71
4.5.3 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Profitabilitas	72
4.5.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas	73
4.5.5 Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Profitabilitas	74
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Keterbatasan Penelitian	76
5.3 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Bank Umum Syariah	3
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Daftar Bank Sampel Penelitian	50
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.3 Tabel Frekuensi Distribusi	55
Tabel 4.4 One-Sample Komlogorov-Smirnov Test	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	64
Tabel 4.8 Hasil Uji F	64
Tabel 4.9 Hasil Uji t	66
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Regresi	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi	69

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	31
Grafik 4.1 Histogram Normalitas Model Regresi ROA.....	56
Grafik 4.2 Histogram Normalitas Model Regresi ROE	57
Grafik 4.3 Histogram Normalitas Model Regresi NPM	57
Grafik 4.4 Normal Probability Plot Model Regresi ROA	58
Grafik 4.5 Normal Probability Plot Model Regresi ROE	58
Grafik 4.6 Normal Probability Plot Model Regresi NPM	58
Grafik 4.7 Uji Heteroskedasitas Model Regresi ROA	61
Grafik 4.8 Uji Heteroskedasitas Model Regresi ROE	62
Grafik 4.9 Uji Heteroskedasitas Model Regresi NPM	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Tabel Input Data Penelitian	80
Lampiran B Hasil Olah Data Penelitian.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal tahun 1990an terjadi krisis keuangan dan kebangkrutan yang melanda beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan Eropa seperti Enron (2001), Vivendis Universal (2002), Ahold (2003), dan Parmalat (2003). Krisis keuangan dan kebangkrutan ini tidak hanya melanda Amerika dan Eropa saja, akan tetapi melanda negara-negara maju lainnya serta negara-negara berkembang seperti negara-negara di Asia Tenggara. Bank Dunia (1998) dalam Kim dan Rasiah (2010) menyatakan bahwa :

“Corporate governance in East Asian countries has been characterized by ineffective boards of directors, weak internal control, unreliable financial reporting, lack of adequate disclosure, lax enforcement to ensure compliance, and poor audits. These problems are evidenced by unreported losses and understated liabilities. Regulators responsible for monitoring and overseeing such practice failed to detect weakness and take timely corrective action” (hal. 39).

Dari pernyataan Bank Dunia di atas, lemahnya *corporate governance* dianggap menjadi kontribusi utama dalam krisis keuangan di Asia Tenggara, seperti pernyataan dari Asian Development Bank (2000) dalam Kim dan Rasiah (2010), bahwa :

“Weak corporate governance was one of the major contributors to the building-up of vulnerabilities in East Asia (including Thailand, Indonesia and Malaysia) that finally led to the banking crisis (from Asian financial crisis) in 1997” (hal. 40).

Indonesia termasuk negara Asia Tenggara yang terkena dampak krisis keuangan tahun 1997. Krisis keuangan tersebut telah menghancurkan sendi perekonomian termasuk menghancurkan perbankan Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya krisis perbankan terparah di Indonesia yang menyebabkan penurunan kinerja bank nasional (Dewayanto, 2010).

Corporate governance merupakan tantangan bagi bank untuk menemukan mekanisme yang menjamin kinerja bank yang lebih baik karena bank merupakan pilar penting bagi perekonomian dan menempati posisi yang dominan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan, bank berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam perekonomian, terutama bagi negara-negara berkembang.

Pada saat krisis melanda tahun 1997, terdapat beberapa bank yang mengalami kebangkrutan, sehingga pemerintah melakukan kebijakan reformasi pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi. Setelah terjadi krisis keuangan yang tahun 1997 tersebut, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini diawali dari satu-satunya bank syariah yang terbukti mampu bertahan dan termasuk kategori bank yang sehat, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pun cukup pesat, terlihat dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Bank Umum Syariah

Kelompok Bank	2007	2008	2009	2010	2011
Bank Umum Syariah	3	5	6	10	11
Unit Usaha Syariah	26	27	25	23	23

Sumber : *outlook* perbankan syariah tahun 2011 dan 2012

Untuk mengatasi terjadinya krisis akibat lemahnya tata kelola bank, Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal sebagai istilah Pakjan 2006. Pakjan 2006 tersebut berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. Peraturan Perbankan Indonesia tersebut harus diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di Indonesia, dan laporan pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan untuk posisi laporan akhir Desember 2007. Peraturan tersebut berlaku untuk semua jenis bank umum, termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat, diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia pada tanggal 9 Desember 2009 mengeluarkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai diberlakukan pada tahun 2010. Pengeluaran Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat yang

menginginkan perbankan syariah menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik terkait dengan kegiatan operasional bank syariah yang diharapkan mematuhi ketentuan syariah. Penerapan *good corporate governance* juga merupakan wujud tanggung jawab kepada masyarakat bahwa bank syariah telah dikelola dengan baik, serta profesional dengan meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Selain itu, penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010).

Menurut Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002, *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Sedangkan, dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dinyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dapat dilihat melalui pelaporan keuangan yang mencerminkan kinerja perusahaan tersebut. Hal ini didukung oleh pernyataan Claessens (2003) dalam Grais dan

Pellegrini (2006), yang mengidentifikasi empat area di mana bukti-bukti empiris menunjukkan dampak positif *corporate governance* yang baik terhadap kinerja perusahaan, yaitu:

1. *Corporate governance* memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan ekonomi. Para pemberi pinjaman dan investor lainnya lebih suka memperluas pembiayaan terhadap suatu usaha jika mereka merasa nyaman dengan pengaturan *corporate governance*-nya, termasuk kejelasan hak-hak para kreditur dan penegakkannya.
2. *Corporate governance* yang baik akan membuat biaya modal yang diperlukan lebih rendah, dengan adanya kesiapan pemegang saham untuk menerima *return* yang lebih kecil karena adanya perasaan bahwa risiko telah berkurang.
3. *Corporate governance* yang baik terbukti mampu mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik.
4. *Corporate governance* yang baik mengurangi resiko tertular kesulitan keuangan.

Kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Jumingan, 2006 dalam Lestari dan Sugiharto, 2007). Salah satu alat pengukuran kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indikator profitabilitas. Profitabilitas

merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Simanjuntak, 2011).

Salah satu manfaat penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) adalah membantu organ perusahaan untuk tetap fokus pada peningkatan kinerja (Al-Manaseer, 2012). Profitabilitas merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja maka dapat disimpulkan, penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan profitabilitas.

Penelitian terdahulu telah menguji mengenai dampak *corporate governance* terhadap kinerja bank di Yordania oleh Al-Manaseer, dkk (2012). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara mekanisme *corporate governance*: jumlah anggota dewan independen dan kepemilikan asing dengan kinerja bank Yordania. Sedangkan, ukuran dewan dan pemisahan peran *Chief Executive Officer* (CEO) dan direktur memiliki hubungan negatif dengan kinerja.

Penelitian serupa juga telah dilakukan di Indonesia, salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Dewayanto (2010). Dewayanto (2010) dalam penelitiannya tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan nasional menyimpulkan mekanisme pemantauan kepemilikan dan pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja bank, kecuali dewan direksi menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Sedangkan, mekanisme pemantauan regulator dan pengungkapan melalui auditor eksternal (*Big 4*) menunjukkan hubungan yang positif terhadap kinerja bank.

Penelitian ini menggunakan kembali variabel-variabel *corporate governance* dan kinerja bank yang telah diteliti oleh Al-Manaseer, dkk (2012) sebelumnya. Akan tetapi, penelitian ini menyesuaikan variabel dengan kondisi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penelitian Al-Manaseer, dkk (2012) dilakukan di Yordania, dimana negara tersebut menggunakan sistem *one tier* sedangkan, Indonesia menggunakan sistem *two tier*. Hal ini menyebabkan variabel dependen ukuran dewan dan dualitas CEO diubah menjadi ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris.

Selain itu, sampel penelitian yang diambil pun berbeda, Al-Manaseer, dkk (2012) menggunakan Bank Umum di Yordania sedangkan, penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menyebabkan variabel dependen kepemilikan asing dihilangkan karena hanya Bank Muamalat dan Bank Maybank Syariah yang memiliki kepemilikan asing. Dalam penelitian ini, terjadi penambahan variabel dependen, yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah dan reputasi Kantor Akuntan Publik. Penambahan kedua variabel tersebut karena keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas bank, dimana Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bank sesuai dengan prinsip Syariah sedangkan, reputasi Kantor Akuntan Publik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas bank untuk memastikan pengendalian laporan keuangan.

Penelitian ini menghilangkan salah satu alat pengukuran kinerja bank yaitu *Earning per Share (EPS)*. Hal ini dikarenakan EPS dinilai tidak konsisten untuk pengukuran profitabilitas yang membandingkan laba perusahaan dengan jumlah

saham (Hanafi dan Halim, 2009). Perbankan syariah di Indonesia mayoritas kepemilikannya terkonsentrasi sehingga jumlah saham dikuasai oleh induk perusahaan dan saham yang beredar dimasyarakat pun sedikit. Dengan demikian, EPS tidak dapat mencerminkan laba perusahaan.

Pada penelitian ini, *corporate governance* diukur dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah, serta reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai variabel independen; kinerja keuangan diukur menggunakan rasio profitabilitas (*Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM)) sebagai variabel dependen; dan ukuran bank sebagai variabel kontrol.

Alexander, Fernell, Halporn (1993) dan Goodstein, Gautarn, Boeker (1994) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber daya secara lebih baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah dewan direksi maka pengelolaan bank akan semakin baik dan meningkatkan profitabilitas.

Menurut Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah dewan komisaris maka koordinasi antar pengawas akan semakin efektif. Penyalahgunaan yang dapat menurunkan profitabilitas bank pun dapat diminimalisir.

Menurut Fama dan Jansen (1983) dalam Santoso (2012), komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dewan komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Dengan demikian, dewan komisaris akan semakin independen dalam mengawasi kinerja bank sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan yang dapat menurunkan profitabilitas.

Menurut Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan bank yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas.

Niinimaki (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa seorang auditor memainkan peran penting sebagai pengawas bank untuk memastikan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, semakin baik reputasi Kantor Akuntan Publik (*Big 4*) maka pengendalian terhadap laporan keuangan akan semakin baik (Sari, 2012). sehingga profitabilitas dapat meningkat.

Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini diberi judul **“DAMPAK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2007-2011”**.

1.2 Perumusan Masalah

Lemahnya *corporate governance* adalah salah satu penyebab terjadinya krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat, dapat melalui krisis tersebut dengan baik. Seiring dengan berjalannya waktu, perbankan syariah di Indonesia pun mulai berkembang. Keinginan masyarakat terhadap perbankan syariah untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada publik pun tinggi. Penerapan *good corporate governance* merupakan salah satu wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Selain itu, penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil penelitian tentang dampak *corporate governance* terhadap kinerja masih tidak konsisten. Penelitian Al-Manaseer, dkk (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara anggota dewan independen dan kepemilikan asing dengan kinerja keuangan bank sedangkan, ukuran dewan serta pemisahan peran CEO dan ketua dengan kinerja keuangan bank memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan, penelitian Wulandari (2006) menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diukur dengan jumlah dewan direktur, proporsi komisaris independen, *debt to equity*, dan *institutional ownership* hanya *debt to equity* yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dampak ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah, serta reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai mekanisme pengukuran

corporate governance terhadap profitabilitas yang diukur melalui rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM)?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak ukuran dewan direksi terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui dampak ukuran dewan komisaris terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui dampak proporsi komisaris independen terhadap profitabilitas.
4. Untuk mengetahui dampak ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap profitabilitas.
5. Untuk mengetahui dampak reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap profitabilitas.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan konsep *Good Corporate Governance*. Temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan perusahaan dalam memahami mekanisme *corporate governance*, sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan.

2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap profitabilitas perbankan syariah.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

1.4 Sistematika Penulisan

Proposal ini terdiri dari tiga bab, adapun urutan pembahasan dari masing-masing bab akan diuraikan dibawah ini:

BAB I : Bab ini merupakan pemandu uraian-uraian mengenai masalah yang timbul sehingga mendorong penulisan proposal ini, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematikan penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, kajian penelitian-penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV : Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai pengolahan data dan sampel serta hasil dari pengolahan data tersebut.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian disertai saran-saran bagi perusahaan yang diteliti dan penelitian selanjutnya, kemudian juga menguraikan keterbatasan-keterbatasan yang ada.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori menjabarkan teori-teori yang mendukung penelitian. Teori-teori tersebut akan membantu pembentukan kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis. Penjelasan teori pada sub bab ini juga akan membantu dalam menganalisis hasil penelitian.

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menggambarkan hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*steward*) (Susetyo, 2009). Teori ini memiliki asumsi bahwa kepentingan personal antara manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan melalui pencapaian tujuan organisasi. Apabila terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, *steward* akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai (Susetyo, 2009). Pada dasarnya karyawan ingin melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengelola yang baik dalam perusahaan.

Selain itu, Donaldson dan Davis (1991) dalam Susetyo (2009) menyatakan:

“Stewardship theory has its roots in psychology and sociology and was designed for researchers to examine situations in which executives as stewards are motivated to act in the best interest of their principals” (hal. 54).

Dalam teori *stewardship* diasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan akan memaksimalkan utilitas kelompok manajemen dan memaksimalkan utilitas kelompok ini dan pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada di dalam kelompok perusahaan tersebut (Susetyo, 2009).

Teori *stewardship* dalam penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan bahwa organ yang terdapat dalam perusahaan akan memaksimalkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Dengan demikian, organ-organ tersebut akan menerapkan *good corporate governance* dalam perusahaan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

2.1.2 Bank Umum Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di

kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/unit syariah.

Pada dasarnya, perbedaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terletak pada status bank tersebut. Bank Umum Syariah statusnya independen dan tidak bernaung di bawah sistem perbankan konvensional. Sedangkan, Unit Usaha Syariah statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional.

Terdapat beberapa kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah yang dinyatakan dalam UU No. 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah*;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah*;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;

- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan

- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Corporate Governance

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal (Hidayat, 2010). Menurut Komite Cadbury (1992) dalam Supatmi (2007), *good corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawannya serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Pelaksanaan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Terdapat lima prinsip dasar pelaksanaan GCG untuk perbankan syariah yang diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

4. Prinsip Profesional (*Professional*)

Memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5. Prinsip Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Terdapat dua jenis mekanisme *good corporate governance*, yaitu mekanisme internal dan eksternal (Agrawal dan Knoeber, 1996 dalam Juwitasari, 2008). Adapun beberapa mekanisme internal, antara lain adalah sebagai berikut (Cadbury, 2000 dalam Juwitasari, 2008):

1. Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PBI No. 11/33/PBI/2009). Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai berikut (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- b. Dewan direksi mengelola Bank Umum Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi (PBI No. 11/33/PBI/2009). Adapun tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Umum Syariah.
- b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi.
- c. Dewan komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.

- d. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Di dalam dewan komisaris, terdapat komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi, atau
- b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya (PBI No. 11/33/PBI/2009):

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia).
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Salah satu mekanisme eksternal dalam *good corporate governance* adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (Cadbury, 2000 dalam Juwitasari, 2008). Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (PMK NOMOR: 17/PMK.01/2008). Tanggung jawab KAP khususnya auditor adalah menyediakan informasi yang memadai dengan kualitas yang tinggi guna pengambilan keputusan oleh para pengguna.

Kualitas KAP sering diproksikan dengan reputasi KAP. Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four*. KAP *Big Four* dianggap lebih memiliki kemampuan dalam mengaudit lebih baik daripada KAP *Non Big Four* (Sari, 2012).

2.1.5 Profitabilitas

Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan salah satunya digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan (Michelle dan Megawati, 2005 dalam Simanjuntak, 2011). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian deviden. Selain itu, Simanjuntak (2011) juga menyatakan bahwa profitabilitas dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin.

Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Budiman, 2007 dalam Hartono dan Sihotang, 2009). Terdapat tiga jenis rasio profitabilitas, yaitu *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) (Keown, 2005 dalam Hartono dan Sihotang, 2009).

Net Profit Margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat pendapatan tertentu. *Return on Asset* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Sedangkan, *Return on Equity* mengukur kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai dampak *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan di Indonesia maupun negara lain. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Al Manaseer, dkk (2012) melakukan penelitian mengenai dampak *corporate governance* terhadap kinerja bank di Yordania. *Corporate governance* diukur dengan ukuran dewan, proporsi dewan, peran ganda CEO serta kepemilikan asing. Sedangkan kinerja keuangan, diukur dengan *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM) dan *Earning per Share* (EPS). Penelitian ini juga menggunakan ukuran bank sebagai variabel kontrol. Peneliti menggunakan 45 sampel data di Yordania serta menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara anggota dewan independen dan kepemilikan asing dengan kinerja bank. Sedangkan, ukuran dewan serta pemisahan peran CEO dan ketua dengan kinerja bank memiliki hubungan yang negatif.

Dewayanto (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan nasional. *Corporate governance* diukur dengan besar pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan

independen, *Capital Adequacy Requirements* (CAR), dan auditor eksternal *Big 4*. Sedangkan kinerja keuangan, diukur dengan ROA. Penelitian ini juga menggunakan ukuran bank sebagai variabel kontrol. Peneliti menggunakan 66 sampel data di Indonesia serta menggunakan analisis deskriptif serta analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme pemantauan kepemilikan dan pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja bank, kecuali dewan direksi menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Sedangkan, mekanisme pemantauan regulator dan pengungkapan melalui auditor eksternal (*Big 4*) menunjukkan hubungan yang positif terhadap kinerja bank. Peneliti juga menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih dari satu variabel dependen untuk mewakili proksi dari kinerja perusahaan, tidak hanya menggunakan ROA.

Kim dan Rasiah (2010) melakukan penelitian tentang hubungan antara *corporate governance* dan kinerja bank di Malaysia sebelum dan sesudah krisis keuangan di Asia. *Corporate governance* diukur dengan *Capital Ratio*, *Fixed Assets* dan *Inventory*, dan kepemilikan. Sedangkan kinerja keuangan, diukur dengan ROE. Peneliti menggunakan 121 sampel data di Malaysia serta menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis regresi dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *corporate governance* dan kinerja keuangan.

Ali (2010) melakukan penelitian mengenai *governance* dan kinerja bank di Tunisia. *Corporate governance* diukur dengan dewan direksi, besar kepemilikan

saham, *debt ratio*, ukuran kontrol manajer yang dilakukan oleh dewan direksi, struktur kepemilikan hingga ukuran bank. Sedangkan kinerja keuangan, diukur dengan tobin q. Peneliti menggunakan 110 sampel data di Tunisia serta menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara direksi independen dengan kinerja serta terdapat hubungan negatif antara tingginya jumlah dewan dan mayoritas pemegang saham dengan kinerja.

Wulandari (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh indikator mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan publik. *Corporate governance* diukur dengan jumlah dewan direktur, proporsi komisaris independen, *debt to equity*, dan *institutional ownership*. Sedangkan kinerja keuangan, diukur dengan tobin q. Peneliti menggunakan 273 sampel data di Indonesia serta menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari keempat variabel indikator mekanisme *corporate governance*, hanya *debt to equity* yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Peneliti juga menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar mempertimbangkan ukuran perusahaan.

Ringkasan penelitian terdahulu mengenai hubungan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel 2.1 serta perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel Independen	Variabel Dependen	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Al Manaseer, dkk (2012)	Ukuran dewan, proporsi dewan independen, peran ganda CEO, dan kepemilikan asing	Kinerja Bank (ROA, ROE, NPM, EPS)	Analisis deskriptif dan analisis regresi berganda	Terdapat hubungan positif antara anggota dewan independen dan kepemilikan asing dengan kinerja bank. Sedangkan, ukuran dewan serta pemisahan peran CEO dan ketua dengan kinerja bank memiliki hubungan yang negatif.
2.	Dewayanto (2010)	Besar pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan independen, <i>Capital Adequacy Requirements</i> (CAR), dan auditor eksternal <i>Big 4</i>	<i>Return on Asset</i> (ROA)	Analisis deskriptif dan analisis regresi berganda	Mekanisme pemantauan kepemilikan dan pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif terhadap kinerja bank, kecuali dewan direksi menunjukkan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Sedangkan, mekanisme pemantauan regulator dan pengungkapan melalui auditor eksternal (<i>Big 4</i>) menunjukkan hubungan yang

					positif terhadap kinerja bank.
3.	Kim dan Rasiah (2010)	<i>Capital Ratio, Fixed Assets dan Inventory</i> , dan kepemilikan	<i>Return on Equity</i> (ROE)	Analisis deskriptif dan metode analisis regresi	Terdapat hubungan positif antara <i>corporate governance</i> dan kinerja keuangan.
4.	Ali (2010)	Dewan direksi, besar kepemilikan saham, <i>debt ratio</i> , ukuran kontrol manajer	Tobin q	Analisis deskriptif dan analisis regresi berganda	Terdapat hubungan positif antara direksi independen dengan kinerja serta terdapat hubungan negatif antara tingginya jumlah dewan dan mayoritas pemegang saham dengan kinerja.
5.	Wulandari (2006)	Jumlah dewan direktur, proporsi komisaris independen, <i>debt to equity</i> , dan <i>institutional ownership</i>	Tobin q	Analisis deskriptif dan analisis regresi berganda	Hanya <i>debt to equity</i> yang secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

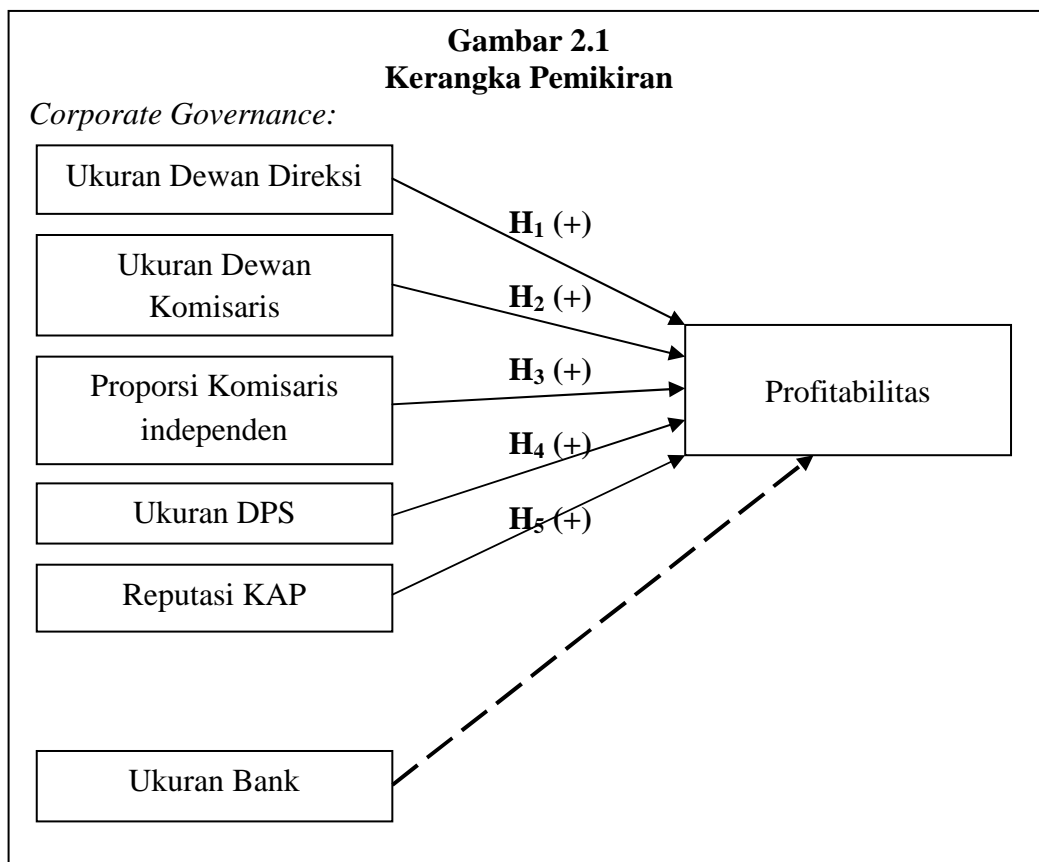
Tabel 2.2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Al-Manaseer, dkk (2012)	Menggunakan proporsi dewan independen sebagai variabel independen, menggunakan ROA, ROE, dan NPM untuk mengukur kinerja bank, dan menggunakan ukuran bank sebagai variabel kontrol.	Menambahkan variabel ukuran dewan direksi, dewan komisaris, ukuran DPS, serta reputasi KAP, dan menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel.
2.	Dewayanto (2010)	Menggunakan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, serta auditor eksternal (reputasi KAP) sebagai variabel independen, menggunakan ROA sebagai alat pengukuran variabel dependen, menggunakan ukuran bank sebagai variabel kontrol.	Menambahkan ukuran DPS sebagai variabel independen, menggunakan ROA, ROE, serta NPM sebagai alat pengukuran variabel dependen dan menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel.
3.	Kim dan Rasiah (2010)	Menggunakan ROE sebagai alat pengukuran variabel dependen.	Menggunakan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP sebagai variabel independen, menggunakan ROA, ROE, serta NPM sebagai alat pengukuran variabel dependen dan menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel.
4.	Ali (2010)	Menggunakan ukuran	Menambahkan ukuran

		dewan direksi sebagai variabel independen	dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP sebagai variabel independen, menggunakan ROA, ROE, dan NPM sebagai alat pengukuran variabel dependen, serta menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel.
5.	Wulandari (2006)	Menggunakan ukuran dewan direksi dan proporsi komisaris independen sebagai variabel independen.	Menambahkan ukuran dewan komisaris, ukuran DPS dan reputasi KAP sebagai variabel independen, menggunakan ROA, ROE, dan NPM sebagai alat pengukuran variabel dependen, serta menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah terdapat indikator dalam suatu perbankan, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP yang mempunyai dampak baik atau tidak terhadap profitabilitas dalam industri perbankan. Dalam pengukuran profitabilitas tersebut menggunakan *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), serta *Net Profit Margin* (NPM). Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1.



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Profitabilitas

Dewan direksi dalam sebuah perusahaan merupakan seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan (id.wikipedia.org). Salah satu tugas dan tanggung jawab dewan direksi dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah mengelola Bank Umum Syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Alexander, Fernell, Halporn (1993) dan Goodstein, Gautarn, Boeker (1994) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber daya

secara lebih baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah dewan direksi maka pengelolaan sumber daya pada Bank Umum Syariah akan semakin baik. Pengelolaan atau manajemen perusahaan yang baik secara tidak langsung akan meningkatkan profitabilitas.

Dewayanto (2010) telah melakukan penelitian mengenai hubungan dewan direksi terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas. Hasil penelitian Dewayanto (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif tetapi tidak signifikan antara dewan direksi dengan kinerja bank yang diukur menggunakan rasio profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis sementara yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H₁ : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan (id.wikipedia.org). Salah satu tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank Umum Syariah. Menurut Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Selain itu, menurut Bukhori dan Raharja (2012), dengan semakin banyak anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan

didapat direksi akan jauh lebih banyak. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka pengawasan akan semakin efektif. Dengan demikian, penyalahgunaan yang dapat menurunkan profitabilitas bank dapat diminimalisir dengan lebih baik sehingga profitabilitas bank pun dapat meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis sementara yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H₂ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4.3 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Profitabilitas

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham (id.wikipedia.org). Komisaris independen diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi perusahaan tersebut. Mereka dapat mengawasi dewan komisaris dan mengawasi bagaimana perusahaan tersebut dijalankan (id.wikipedia.org). Yuso dan Argonda (2007) dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa Komisaris Independen lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Menurut Fama dan Jansen (1983) dalam Santoso (2012), komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dewan komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Dengan demikian, semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin tinggi independensi yang ada dalam dewan komisaris, sehingga pengawasan yang dilakukan akan

lebih obyektif terhadap pengelolaan oleh manajemen yang dapat menurunkan profitabilitas lebih dapat diminimalisir, sehingga profitabilitas akan lebih meningkat.

Al-Manaseer (2012) telah melakukan penelitian mengenai hubungan proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas. Hasil penelitian Al-Manaseer (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara proporsi komisaris independen dengan kinerja bank yang diukur menggunakan rasio profitabilitas

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis sementara yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H₃ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4.4 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Menurut Chtourou, dkk (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi profitabilitas. Dengan demikian, profitabilitas bank akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis sementara yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H₄ : Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2.4.5 Pengaruh Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Profitabilitas

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (id.wikipedia.org). Niinimaki (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa seorang auditor memainkan peran penting sebagai pengawas bank untuk memastikan pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

Kualitas Kantor Akuntansi Publik sering diproksikan reputasi Kantor Akuntan Publik. Kantor Akuntan Publik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP *Big 4* dan *Non Big 4*. Apabila sebuah perusahaan menggunakan KAP *Big 4* maka pengendalian terhadap laporan keuangan akan semakin baik (Sari, 2012). Dengan demikian, secara tidak langsung hal-hal yang dapat mengurangi profitabilitas akan dapat terdeteksi dan ditanggulangi oleh perusahaan, sehingga profitabilitas suatu perusahaan akan meningkat.

Dewayanto (2010) telah melakukan penelitian mengenai hubungan auditor *Big 4* terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas. Hasil penelitian Dewayanto (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara hubungan auditor *Big 4* dengan kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis sementara yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

H₅ : Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dalam menganalisis dampak *corporate governance* terhadap profitabilitas bank, maka variabel-variabel yang diteliti sebagai berikut:

- a. Variabel Independen : Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan reputasi Kantor Akuntan Publik.
- b. Variabel Dependen : Profitabilitas
- c. Variabel Kontrol : Ukuran bank.

3.1.1 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai Anggaran Dasar yang telah dibuat (PBI No. 11/33/PBI/2009). Ukuran dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan direksi dalam suatu bank.

3.1.2 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi (PBI No. 11/33/PBI/2009). Ukuran dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu bank.

3.1.3 Proporsi Komisaris Independen

Menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank. Proporsi komisaris independen diukur dengan rumus:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

3.1.4 Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ yang bertugas untuk mengawasi jalannya bank sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 11/33/PBI/2009). Ukuran Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah.

3.1.5 Reputasi Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (PMK NOMOR: 17/PMK.01/2008). Kualitas Kantor Akuntan Publik dalam penelitian ini diprosikan dengan reputasi KAP. Reputasi Kantor Akuntan Publik dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan *variabel dummy*. Apabila bank syariah menggunakan KAP *Big 4* maka akan diberi kode "1" dan yang menggunakan KAP *Non Big 4* akan diberi kode "0". Adapun KAP *Big 4* adalah sebagai berikut:

- a. Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
- b. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio.
- c. KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja.
- d. Price Waterhouse Coopers berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan.

3.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan beberapa rasio, yaitu:

1. *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ bersih}{Total\ Asset}$$

2. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{Laba\ bersih}{Modal\ saham}$$

3. *Net Profit Margin* (NPM)

Profit Margin (NPM) menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu.

NPM dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Net\ Profit\ Margin = \frac{Laba\ bersih}{Pendapatan}$$

3.1.7 Ukuran Bank

Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Wijayanti dan Mutmainah (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang tercermin dari nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun yang diukur dengan \ln (Ln) dari total aktiva. Ukuran bank dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Ukuran\ Bank = \ln(total\ aset)$$

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2007-2011. Digunakannya Bank Umum Syariah sebagai sampel karena Bank Umum Syariah berdiri sendiri bukan merupakan unit kerja dari Bank Konvensional seperti Unit Usaha Syariah. Selain itu, Bank Umum Syariah telah dianggap sebagai bank yang murni menggunakan transaksi berprinsip syariah oleh Bank Indonesia. Pengambilan data periode tahun 2007-2011 dikarenakan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dikeluarkan pada tahun 2006 dan laporan

pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan pada akhir tahun 2007. Teknik pengambilan data dilakukan secara *pooling* dikarenakan terbatasnya Bank Umum Syariah serta data yang tersedia pada periode 2007-2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

Data sekunder yang diperlukan antara lain:

1. Laporan Keuangan tahunan pada periode 2007-2011.
2. *Annual Report* pada periode 2007-2011.

Data diperoleh dari publikasi dalam situs masing-masing bank. Data penelitian yang mencakup data periode 2007-2011 dipandang cukup mewakili kondisi perbankan syariah di Indonesia pada saat itu dan indikator-indikator perbankan pada periode tersebut.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 sampel data yang dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan perbankan syariah selama periode tahun 2007-2011 yang bisa dilihat pada situs masing-masing bank sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa *annual report* bank dan laporan keuangan bank yang dipublikasikan. Data *annual report* dan laporan keuangan data *time series* untuk tahun 2007-2011.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program SPSS.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian yang dilakukan antara lain:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006).

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan *plotting* data residual akan

dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Ghozali,2006).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data meyebar lebih jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang dpat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov- Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05 maka data *residual* terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol (Ghozali,2006).

Gejala multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $tolerance < 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

Analisis menggunakan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan yang mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji glejser. Dalam uji glejser, apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut, diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2006).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2006).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan *run test*. *Run test* digunakan sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2006).

3.5.3 Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (lebih dari satu) terhadap satu variabel terikat. Terdapat tiga persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan pertama

$$ROA = \alpha + \beta_1 UDD + \beta_2 UDK + \beta_3 PKI + \beta_4 DPS + \beta_5 KAP + \beta_6 SIZE + e$$

2. Persamaan kedua

$$ROE = \alpha + \beta_1 UDD + \beta_2 UDK + \beta_3 PKI + \beta_4 DPS + \beta_5 KAP + \beta_6 SIZE + e$$

3. Persamaan ketiga

$$NPM = \alpha + \beta_1 UDD + \beta_2 UDK + \beta_3 PKI + \beta_4 DPS + \beta_5 KAP + \beta_6 SIZE + e$$

Keterangan :

α : *intercept*

ROA : *Return on Assets*

ROE : *Return on Equity*

NPM : *Net Profit Margin*

UDD : Ukuran Dewan Direksi

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

PKI : Proporsi Komisaris Independen

DPS : Ukuran Dewan Pengawas Syariah

KAP : Kantor Akuntan Publik *Big Four* (“1” untuk KAP *Big Four* dan
 “0” untuk KAP *Non Big Four*)

SIZE : Ukuran Bank

e : error

3.5.4 Pengujian Hipotesis

3.5.4.1 Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka model regresi akan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.4.2 Uji t (Parsial)

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi $>0,05$ maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika signifikansi $<0,05$ maka hipotesis diterima (Ghozali, 2006).

3.5.4.3 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan uji model. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Dalam kenyataan nilai *adjusted R²* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif (Ghozali, 2006). Menurut Gujarati (2003) dan Ghozali (2006) jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted R²* negatif, maka nilai *adjusted R²* dianggap bernilai nol.